

Visionist

Vol. 8, Nomor 2–September 2019

ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI PENGURUS BUMKAM DAN PENYERTAAN MODAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI KAMPUNG <i>Aan Zeni, Andala R P Barusman dan Defrizal</i>	1-8
ANALISIS PERILAKU NASABAH DENGAN ADANYA LAYANAN <i>MOBILE BANKING</i> DI BANK SINARMAS TELUK BETUNG LAMPUNG <i>Ayu Tiara, Marzuki Noor dan Habibburahman</i>	9-14
ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI DINAS BINA MARGA PROVINSI LAMPUNG <i>Devi Agustiana, A. Suharyo dan V. Saptarini</i>	15-21
ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN KOMPENSASI DAN DISIPLIN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT <i>Dodi Irwansyah, Andala R P Barusman dan M. Oktavianur</i>	22-29
HUBUNGAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK) DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL DENGAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN <i>Meutia Yurisca, Haninun dan Hendri Dunan</i>	30-34
HUBUNGAN KEPEMIMPINAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG <i>Rendra, Yusuf S Barusman dan M. Oktavianur</i>	35-38
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI PEGAWAI DI KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO <i>Rohim, Agus Wahyudi dan Marzuki Noor</i>	39-45
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PADA KEPUASAN SERTA DAMPAKNYA PADA LOYALITAS PELANGGAN TELKOMSEL PADA MEREK KARTU AS DI BANDAR LAMPUNG <i>Sri Nur F, Andala R P Barusman dan Iskandar A</i>	46-50

Jurnal Manajemen Visionist	Volume 8	Nomor 2	Halaman 1 – 50	Bandar Lampung Sept 2019	ISSN 1411 – 4186
-------------------------------	----------	---------	-------------------	-----------------------------	---------------------

ISSN 1411 – 4186

Jurnal Manajemen

Visionist

Volume 8, Nomor 2 – September 2019

DEWAN PENYUNTING

Penyunting Ahli

Sudarsono (Ketua)
Sri Utami Kuntjoro
Sinung Hendratno
Agus Wahyudi
Abdul Basit

Penyunting Pelaksana

Budhi Waskito
Ardansyah
Eka Kusmayadi
Zainal Abidin

Alamat:

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 89, Bandar Lampung
Tel. 0721- 789825; Fax. 0721 - 770261
Email: visionist@ubl.ac.id

Diterbitkan oleh:

Program Studi Manajemen (S2)
Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

Hubungan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan Pengawasan Fungsional dengan Akuntabilitas Keuangan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran

Meutia Yurisca¹, Haninun², Hendri Dunan³
Program Studi Magister Manajemen Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Akuntabilitas Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran diindikasikan masih rendah dilihat berdasarkan observasi dengan data LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2013.

Terdapat hubungan positif antara anggaran berbasis kinerja dan pengawasan fungsional dengan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. Metode penelitian deskriptif korelasional adalah suatu metode yang menjelaskan keterkaitan antara 2 (dua) variabel atau lebih yaitu variabel bebas dan variabel terikat, dengan tujuan membuktikan kebenaran hipotesis.

hasil uji hipotesis didapat nilai p value atau $\text{sig} < \alpha$ ($0,000 < 0,01$). Artinya H_0 ditolak dapat disimpulkan terdapat hubungan positif antara anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Anggaran berbasis kinerja berhubungan positif dengan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Pengawasan fungsional berhubungan positif dengan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Kata Kunci : *Anggaran, Pengawasan, Akuntabilitas Keuangan*

Pendahuluan

Kurang tercapainya ke tiga program kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran tersebut diindikasikan karena Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran kurang menerapkan kebijakan anggaran berbasis kinerja sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada tidak tercapainya prioritas kegiatan.

Faktor lain yang dapat meningkatkan Akuntabilitas Keuangan adalah dibutuhkan lembaga *control* atau pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah Baswir (1997) Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2002 tentang Pertimbangan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, pengusutan, dan penilaian dalam hal ini adalah inspektorat kabupaten/kota.

Lebih lanjut pengawasan fungsional pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran belum berjalan efektif, Inspektorat selaku Badan pengawas Internal kurang efektif melakukan pemeriksaan di SKPD secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan (6 bulan sekali), kurang efektif melakukan pembinaan tentang tata cara pengelolaan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurang efektif melakukan pemeriksaan tentang disiplin penggunaan anggaran, tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta jarang memberikan sanksi jika SKPD tidak memberikan tanggapan dari LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dengan akuntabilitas keuangan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan pengawasan fungsional dengan akuntabilitas keuangan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Akuntabilitas Keuangan

Menurut Ghartey (2000), Dunan & Liyana (2014), menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, kemana, yang mana, dan bagaimana suatu petanggungjawaban harus dilaksanakan. Carino (2004) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kemenangannya. Setiap orang harus benar-benar menyadari bahwa tindakannya bukan hanya memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain.

Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006). Performance Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada 'output' organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. Ciri utama Performance Based Budgeting adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dan hasil yang diharapkan (outcomes), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan. (Haryanto, dkk: 2007).

Pengertian Pengawasan Fungsional

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Menurut Strong (dalam Hasibuan, 2006) pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Koontz (dalam Hasibuan, 2006) pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap Pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dapat terselenggara. Terry (dalam Hasibuan, 2006) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Metodologi

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. Metode penelitian deskriptif korelasional adalah suatu metode yang menjelaskan keterkaitan antara 2 (dua) variabel atau lebih yaitu variabel bebas dan variabel terikat, dengan tujuan membuktikan kebenaran hipotesis.

Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran yang berjumlah 150 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan subjek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Hadi, 1999).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari responden dengan menggunakan metode observasi dan kuesioner.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan menggunakan metode observasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan suatu analisis data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian dilakukan analisa berdasarkan metode statistik. Adapun analisa kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah koefisien korelasi secara parsial dan koefisien korelasi secara simultan, uji korelasi *produk moment* menggunakan bantuan program *software* SPSS.

Koefisien Korelasi Secara Parsial

Tabel 1. Koefisien Korelasi Secara Parsial

Correlations			Anggaran Berbasis Kinerja	Pengawasan Fungsional	Akuntabilitas keuangan
Spearman's rho	Anggaran Berbasis Kinerja	Correlation Coefficient	1.000	.919**	.887**
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000
		N	60	60	60
	Pengawasan Fungsional	Correlation Coefficient	.919**	1.000	.867**
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000
		N	60	60	60
	Akuntabilitas keuangan	Correlation Coefficient	.887**	.867**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.
		N	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1. Hubungan X_1 dengan Y

Koefisien korelasi antara anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sebesar 0,887, hubungan antar ke dua variabel dalam kategori “tinggi” berada pada interval (0,801 s/d 1,00) dan arah korelasi (+) artinya jika anggaran berbasis kinerja dijalankan secara efektif maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan begitu juga sebaliknya jika anggaran berbasis kinerja tidak berjalan efektif maka akan menurunkan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Hubungan X_2 dengan Y

Koefisien korelasi antara pengawasan fungsional dengan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sebesar 0,887, hubungan antar ke dua variabel dalam kategori “tinggi” berada pada interval (0,801 s/d 1,00) dan arah korelasi (+) artinya jika pengawasan fungsional dijalankan secara efektif maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan begitu juga sebaliknya jika pengawasan fungsional tidak berjalan efektif maka akan menurunkan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Koefisien Korelasi Secara Simultan

Analisis korelasi secara simultan digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Nilai korelasi (r) ada dua arah, nilai positif menunjukkan hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka Y turun).

Tabel 2. Koefisien Korelasi Secara Simultan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.898^a	.807	.797	2.671

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Fungsional, Anggaran Berbasis Kinerja

Koefisien korelasi anggaran berbasis kinerja dan pengawasan fungsional dengan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sebesar 0,898 artinya ketiga variabel tersebut mempunyai hubungan yang “tinggi” berada pada interval (0,801 s/d 1,00) dan arah hubungan positif berarti jika anggaran berbasis kinerja dan pengawasan fungsional dilaksanakan efektif maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran dan sebaliknya jika anggaran berbasis kinerja dan pengawasan fungsional tidak efektif dilaksanakan maka akan berakibat menurunnya akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, jika nilai sig < 0,001 maka hipotesis yang diajukan diterima atau Ho ditolak dan Ha diterima.

Tabel 3. Uji Hipotesis

Correlations			Anggaran Berbasis Kinerja	Pengawasan Fungsional	Akuntabilitas keuangan
Spearman's rho	Anggaran Berbasis Kinerja	Correlation Coefficient	1.000	.919**	.887**
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000
		N	60	60	60
	Pengawasan Fungsional	Correlation Coefficient	.919**	1.000	.867**
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000
		N	60	60	60
	Akuntabilitas keuangan	Correlation Coefficient	.887**	.867**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.
		N	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1. Uji Hipotesis X_1 terhadap Y:

Berdasarkan uji hipotesis variabel anggaran berbasis kinerja di dapat tingkat signifikan 0,000. karena *probability* atau tingkat signifikan jauh lebih kecil dari 0,01 maka Anggaran berbasis kinerja berhubungan positif dengan akuntabilitas keuangan. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian Hipotesis pertama: “Terdapat hubungan positif antara anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran” *diterima*.

2. Uji Hipotesis X_2 terhadap Y:

Berdasarkan uji hipotesis variabel pengawasan fungsional di dapat t tingkat signifikan 0,000 karena *probability* atau tingkat signifikan jauh lebih kecil dari 0,01 maka pengawasan fungsional berhubungan positif dengan akuntabilitas keuangan. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian Hipotesis Kedua: “Terdapat hubungan positif antara pengawasan fungsional dengan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran” *diterima*.

Hubungan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisa data kualitatif pada Tabel 11 di ketahui bahwa anggaran berbasis kinerja pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam kategori Cukup Efektif (51,7%). Selanjutnya dapat

diketahui berdasarkan analisis, hasil uji hipotesis didapat nilai p value atau $\text{sig} < \alpha$ ($0,000 < 0,01$). Artinya H_0 ditolak dapat disimpulkan terdapat hubungan positif antara anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Hubungan Pengawasan Fungsional dengan Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil analisa data kualitatif pada tabel 13 di ketahui bahwa pengawasan fungsional pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam kategori "Cukup Efektif" (57,1%) sedangkan pada akuntabilitas keuangan dalam kategori "Cukup Baik" (51,6%). Selanjutnya dapat diketahui berdasarkan analisis, hasil uji hipotesis didapat nilai p value atau $\text{sig} < \alpha$ ($0,000 < 0,01$). Artinya H_0 ditolak dapat disimpulkan terdapat hubungan positif antara pengawasan fungsional dengan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Kesimpulan dan Implikasi

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggaran berbasis kinerja berhubungan positif dengan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pengawasan fungsional berhubungan positif dengan akuntabilitas keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa implikasi yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Hendaknya Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran memberikan pelatihan terhadap semua yang terlibat dalam tim pengelola keuangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar dapat lebih memahami tata cara pengelolaan anggaran berbasis kinerja, sekaligus menempatkan pegawai yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan sebagai bendahara pengeluaran sebagai pelaksana dalam pengelolaan anggaran SKPD (*the right man on the right place*) dan fasilitas pendukung perlu ditingkatkan untuk mendukung kinerja dari sumber daya manusia tersebut.
2. Diharapkan kepada lembaga yang bertugas melakukan fungsi pengawasan agar dapat bekerja profesional, dengan kata pada saat membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan fakta yang ada atau sesuai dengan hasil temuan. Serta memberikan sanksi yang tegas dan tidak memihak bagi seluruh instansi yang melakukan pelanggaran dalam penyimpangan keuangan rangka agar memberi efek jera bagi instansi tersebut.
3. Hendaknya Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran melaksanakan tugasnya dalam membuat surat pertanggungjawaban dengan lebih tertib, tepat waktu dan sesuai dengan *Standart Operation Procedure* (SOP).

Daftar Pustaka

- Arikunto, 2001, Dasar-Dasar Penelitian Statistik Sosial. Bandung Alfabet.
- Dunan, Hendri, Liyana. 2014. Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk di Tarahan Tahun 2007-2011. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol, 5, No; 1.
- Hadi, 1999, Statistik 2. Andi Offset, Yogyakarta.
- Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, 2006, Manajemen sumber daya manusia: dasar kunci keberhasilan. CV Haji Mas Agung, Jakarta.
- Hou, Yilin. 2010. The Performance of Performance-Based Budgeting in Boom and Bust Years: An Analytical Framework and Survey of States. Prepared for Presentation at the Annual Conference of the American Society for Public Administration (ASPA) San Jose, CA, April 9-13, 2010.